

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/KSP-07/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penyusunan RKAKL
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAKL

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam membuat rencana kerja dan anggaran-kementerian dan lembaga (RKAKL) di Fisip.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

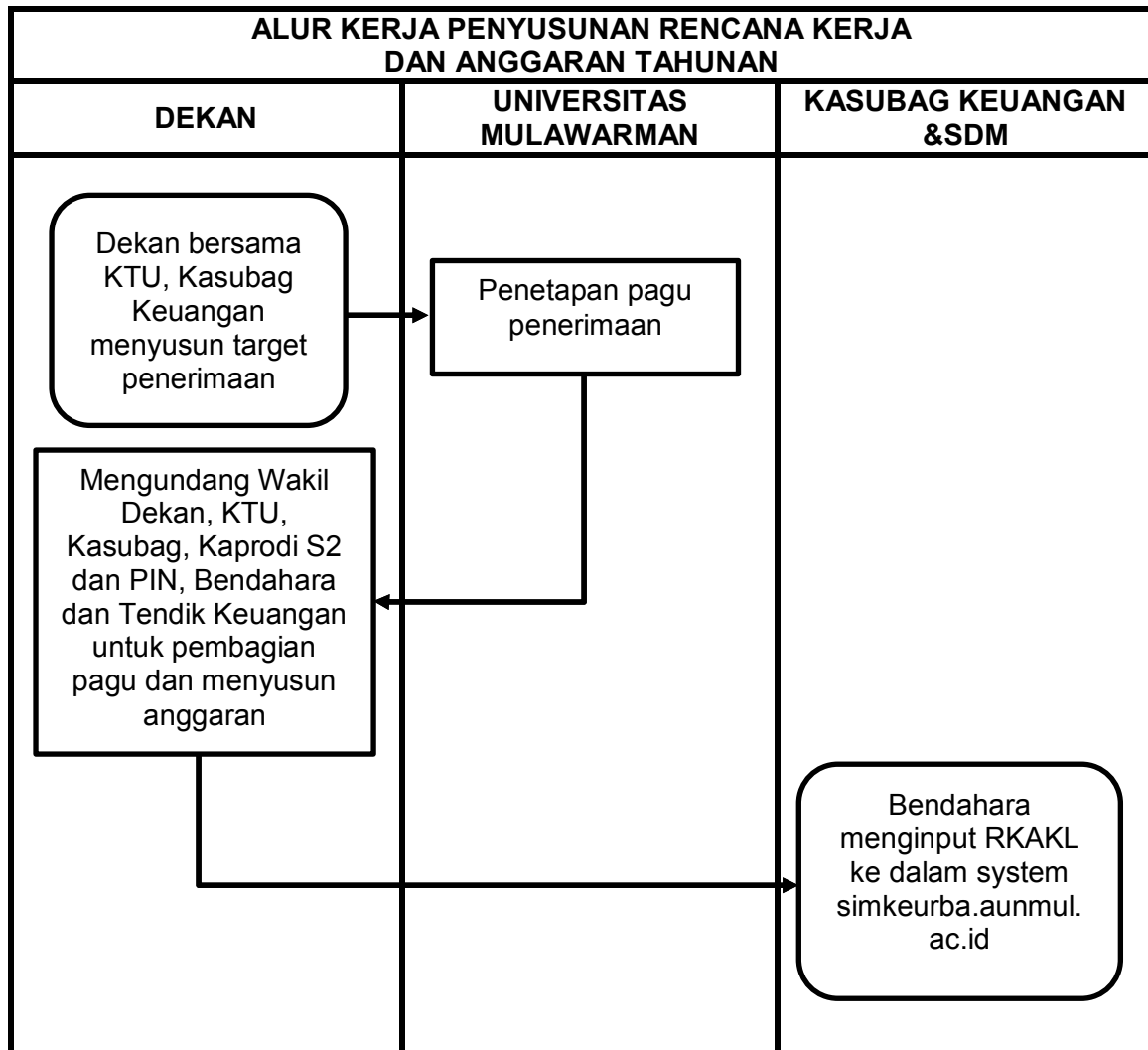
- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan
- 4.3. KTU
- 4.4. Kasubag
- 4.5. Bendahara
- 4.6. Tendik Keuangan

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan, KTU, Kasubag Keuangan menyusun target penerimaan	Dekan, KTU, Kasubag Keuangan	Berkas surat	1 hari	Surat
2	Penetapan pagu penerimaan	Universitas Mulawarman	Berkas surat	1 hari	Surat
3	Dekan mengundang Wakil Dekan, KTU, Kasubag, Kaprodi S2 dan PIN, Bendahara dan Tendik Keuangan untuk pembagian pagu dan menyusun anggaran	Dekan, KTU, Kasubag, Kaprodi S2 & PIN, Bendahara, Tendik Keuangan	Draft RKAKL	1 hari	Draft RKAKL
4	Kasubag Keuangan, bendahara menginput RKAKL ke dalam system simkeurba.unmul.ac.id	Kasubag Keuangan, Bendahara	RKAKL	1 jam	RKAKL

6. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7.2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 7.3. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 7.4. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.